

STRATEGI GURU PPKn DALAM MENGINTERNALISASIKAN ETIKA KEWARGANEGARAAN DIGITAL (*DIGITAL CITIZENSHIP ETHICS*) PADA SISWA DI SMA NEGERI 8 SAMARINDA

Sadam Aditya Nugeraha¹, Jamil², Marwiah³, Asnar⁴, Jawatir Pardosi⁵, Endang Herliah⁶

sadamaditya20@gmail.com¹, jamil@fkip.unmul.ac.id², marwiah040162@gmail.com³,
asnar3101@gmail.com⁴, pardo_si@yahoo.com⁵, endangherliah@fkip.unmul.ac.id⁶

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai, moral, dan etika kewarganegaraan digital kepada peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru PPKn dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital pada siswa di SMA Negeri 8 Samarinda, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas guru PPKn, kepala sekolah, dan siswa SMA Negeri 8 Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn menerapkan berbagai strategi dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital, antara lain melalui pembelajaran berbasis proyek, diskusi kasus, penggunaan media digital yang kontekstual, serta integrasi nilai-nilai karakter dalam aktivitas daring. Strategi tersebut terbukti efektif dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab, kesadaran moral, serta perilaku etis siswa dalam berinteraksi di dunia maya. Adapun faktor pendukungnya meliputi dukungan kebijakan sekolah, pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan kolaborasi antar guru. Sementara itu, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan literasi digital sebagian siswa dan keterbatasan waktu dalam mengintegrasikan materi etika digital secara mendalam.

Kata Kunci: Strategi Guru, PPKn, Etika Kewarganegaraan Digital, Literasi Digital, SMA Negeri 8 Samarinda.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly influenced various aspects of social life, including education. In this context, Civic Education (PPKn) teachers play a crucial role in instilling moral values, responsibility, and digital citizenship ethics in students to help them become responsible citizens in the digital world. This study aims to describe the strategies employed by Civic Education teachers in internalizing digital citizenship ethics among students at SMA Negeri 8 Samarinda and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of Civic Education teachers, the school principal, and students of SMA Negeri 8 Samarinda. The results of the study show that Civic Education teachers apply various strategies to internalize digital citizenship ethics, including project-based learning, case discussions, the use of contextual digital media, and the integration of character values in online activities. These strategies have proven effective in fostering students' sense of responsibility, moral awareness, and ethical behavior in digital interactions. The supporting factors include school policy support, the utilization of educational technology, and collaboration among teachers. Meanwhile, the challenges faced include limited digital literacy among some students and insufficient time to integrate digital ethics materials comprehensively.

Keywords: Teacher Strategies, Civic Education, Digital Citizenship Ethics, Digital Literacy, SMA Negeri 8 Samarinda.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah mengubah cara manusia berinteraksi, belajar, bekerja, dan berpikir. Dunia digital menjadi ruang baru bagi manusia untuk berekspresi, berpartisipasi, dan membangun identitas sosial. Internet dan media sosial kini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi peserta didik di tingkat sekolah menengah. Perubahan besar ini menghadirkan berbagai peluang, namun sekaligus membawa tantangan serius dalam hal moral, etika, dan tanggung jawab warga negara di ruang digital.

Generasi muda, termasuk siswa SMA, merupakan kelompok yang paling intens menggunakan teknologi digital. Mereka terbiasa menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), YouTube, dan berbagai platform komunikasi daring lainnya. Aktivitas digital yang mereka lakukan tidak hanya sekadar mencari informasi atau hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan pendapat, membangun jaringan sosial, dan bahkan mempengaruhi opini publik. Namun, di balik kemudahan dan kebebasan tersebut, muncul berbagai persoalan etika seperti ujaran kebencian (hate speech), penyebaran berita palsu (hoaks), perundungan siber (cyberbullying), pelanggaran privasi, dan perilaku konsumtif digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan menggunakan teknologi digital dengan kesadaran beretika dalam bermedia.

Dalam konteks kewarganegaraan modern, kemampuan individu untuk berperilaku bijak dan bertanggung jawab di ruang digital dikenal dengan istilah kewarganegaraan digital (digital citizenship). Konsep ini mencakup kemampuan seseorang untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam dunia maya, menghargai perbedaan, menjaga privasi, serta menggunakan teknologi untuk tujuan positif. Namun, kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknologis, tetapi juga dengan etika kewarganegaraan digital (digital citizenship ethics), yaitu kesadaran moral dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan di dunia maya.

Di Indonesia, konsep kewarganegaraan digital semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan pelajar. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2022) mendefinisikan kewarganegaraan digital sebagai kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, warga negara digital yang baik bukan hanya mampu mengakses teknologi, tetapi juga dapat menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan yang positif, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Etika kewarganegaraan digital menjadi isu penting di kalangan remaja sekolah menengah, termasuk di SMA Negeri 8 Samarinda. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari guru, siswa di sekolah ini tergolong aktif dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital, baik untuk keperluan belajar maupun hiburan. Namun, penggunaan yang tidak terarah kadang menimbulkan perilaku yang kurang etis, seperti komentar negatif di media sosial, penyebaran konten tanpa izin, atau saling ejek di grup daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan bimbingan moral dan etika yang kuat agar siswa mampu menjadi warga digital yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

Selain pembelajaran di kelas, guru PPKn juga berperan sebagai teladan moral dalam penggunaan teknologi. Sikap dan perilaku guru dalam bermedia sosial dapat menjadi contoh bagi siswa. Guru yang menunjukkan etika berkomunikasi secara santun di dunia maya, menghargai perbedaan pendapat, dan memanfaatkan media digital untuk hal positif akan menjadi figur panutan yang kuat. Keteladanan seperti ini merupakan bagian penting dari

strategi internalisasi nilai, karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat secara langsung dari figur yang mereka hormati. Oleh karena itu, strategi guru PPKn dalam membangun etika kewarganegaraan digital tidak hanya terbatas pada metode pembelajaran, tetapi juga mencakup peran keteladanan, pembiasaan, dan pengawasan moral di lingkungan sekolah.

Dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan digital memiliki hubungan erat dengan pendidikan kewarganegaraan (PPKn). Melalui PPKn, siswa diarahkan untuk menjadi warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam kehidupan digital. Menurut Wibowo (2021), pendidikan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri dengan tantangan era digital agar siswa mampu berperan aktif sebagai warga negara digital yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika.

Beberapa ahli Indonesia juga memberikan definisi yang memperluas makna kewarganegaraan digital. Misalnya, Hidayat (2020) menyatakan bahwa kewarganegaraan digital merupakan refleksi dari sikap kewarganegaraan dalam ruang maya, di mana individu harus memiliki kesadaran etika, hukum, dan sosial dalam setiap aktivitas digitalnya. Dengan demikian, kewarganegaraan digital mencakup tiga dimensi utama: kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam masyarakat digital.

Secara lebih rinci, Budiarto dan Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa warga negara digital ideal memiliki kemampuan dalam tiga aspek penting. Pertama, kompetensi digital (digital literacy), yaitu kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara tepat. Kedua, etika digital (digital ethics), yaitu kesadaran moral dalam berinteraksi di dunia maya. Ketiga, tanggung jawab digital (digital responsibility), yaitu kemampuan menjaga keamanan, privasi, dan menghormati hak orang lain dalam ruang digital.

Dalam konteks sosial budaya Samarinda, yang merupakan kota berkembang dengan tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi, pendidikan etika digital menjadi semakin relevan. Banyak siswa memiliki akses luas terhadap gawai dan media sosial, namun belum semuanya mampu memilah informasi atau bersikap kritis terhadap konten digital. Jika tidak dibekali dengan nilai moral yang kuat, kemajuan teknologi justru dapat menjerumuskan mereka pada perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan informasi, ujaran kebencian, dan rendahnya empati sosial. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi benteng moral yang mempersiapkan generasi muda agar mampu hidup dengan bijak di dunia digital yang sarat tantangan.

Dalam konteks SMA Negeri 8 Samarinda, penguatan nilai-nilai kewarganegaraan digital menjadi sangat penting karena siswa berada pada tahap perkembangan yang rentan terhadap pengaruh media sosial dan informasi digital. Guru PPKn berperan strategis dalam membimbing siswa untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menghormati perbedaan, serta memahami konsekuensi hukum dan moral dari setiap tindakan di dunia maya. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga media untuk membentuk warga negara digital yang beretika dan bertanggung jawab.

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian naturalistik karena proses pengumpulannya dilakukan dalam kondisi yang alami dan nyata tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari peneliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya akan makna dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa angka atau statistik, melainkan informasi yang bersifat deskriptif dan kontekstual, sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara utuh sesuai dengan perspektif para pelaku di

lapangan. Menurut Sugiyono (2015:8-9), metode kualitatif sangat tepat digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan atau fenomena dalam situasi alami tanpa mengubah kondisi aslinya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena secara sistematis dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pemaparan fakta, keadaan, dan kejadian yang terjadi pada saat penelitian berlangsung atau yang telah terjadi sebelumnya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menangkap kompleksitas situasi secara utuh dan menyajikan gambaran yang kaya akan konteks serta makna dari fenomena yang sedang dikaji. Pendekatan ini sangat sesuai untuk penelitian yang ingin memahami proses, pengalaman, atau pandangan subjek secara mendalam dan detail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Guru PPKn dalam Menginternalisasikan Etika Kewarganegaraan Digital

Guru PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab digital kepada siswa melalui berbagai strategi pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Strategi yang diterapkan difokuskan pada pengembangan kesadaran siswa terhadap etika bermedia digital agar mereka mampu bersikap bijak, sopan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan teladan dalam membimbing siswa memahami makna etika kewarganegaraan digital dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu strategi yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dan diskusi reflektif, di mana siswa diajak untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan isu-isu digital seperti literasi media, keamanan data pribadi, dan perilaku etis di media sosial. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar secara teoretis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan empatik dalam menilai perilaku digital. Guru juga memanfaatkan studi kasus aktual seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian untuk melatih siswa menganalisis permasalahan etika digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, guru menerapkan pendekatan berbasis nilai (value-based learning) dengan menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat dalam setiap aktivitas pembelajaran. Guru juga memberikan keteladanan dalam penggunaan media digital yang baik, seperti etika berkomunikasi di platform daring dan penggunaan sumber informasi yang sahih. Dengan berbagai strategi tersebut, proses pembelajaran PPKn tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral serta membentuk karakter siswa sebagai warga digital yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 8 Samarinda berperan penting dalam menanamkan nilai moral, tanggung jawab, dan etika digital kepada peserta didik melalui berbagai strategi pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Dalam era digital, peran guru tidak hanya terbatas sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi siswa dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan digital secara nyata (Majid, 2020). Strategi pembelajaran yang diterapkan berfokus pada pengembangan kesadaran etika digital agar siswa mampu bersikap bijak, sopan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut Sanjaya (2019), strategi pembelajaran yang baik harus menyesuaikan

dengan kebutuhan dan karakter peserta didik, serta mengaitkan materi pelajaran dengan fenomena sosial yang relevan dengan kehidupan mereka.

Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah Project-Based Learning (PjBL) dan diskusi reflektif, yang mengarahkan siswa untuk memecahkan permasalahan nyata di dunia digital, seperti penyebaran hoaks, etika bermedia sosial, dan keamanan data pribadi. Melalui proyek yang dirancang berdasarkan isu-isu aktual, siswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan empati terhadap dampak sosial dari aktivitas digital. Model PjBL ini dianggap efektif karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri dan mendalam melalui pengalaman langsung (Wena, 2019). Selain itu, penggunaan studi kasus dalam pembelajaran membantu siswa memahami implikasi etika digital melalui analisis terhadap contoh nyata yang sering mereka temui. Menurut Hosnan (2021), strategi berbasis kasus mendorong siswa untuk berpikir reflektif dan menumbuhkan kesadaran moral terhadap isu sosial yang sedang berkembang.

Selain penerapan metode pembelajaran aktif, guru PPKn juga menggunakan pendekatan value-based learning untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat dalam setiap kegiatan belajar. Guru memberikan keteladanan dalam perilaku bermedia, seperti menyampaikan informasi dengan bahasa yang sopan, menghargai privasi, dan menggunakan sumber digital yang valid. Hal ini sejalan dengan pendapat Zubaedi (2021) yang menyatakan bahwa keteladanan guru merupakan strategi moral paling efektif dalam pembentukan karakter, karena peserta didik lebih mudah belajar melalui perilaku nyata dibandingkan penjelasan teoritis. Dengan demikian, strategi pembelajaran yang diterapkan guru PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa sebagai warga digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab.

Efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan guru PPKn dapat diukur dari sejauh mana siswa memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai etika kewarganegaraan digital dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan panutan moral dalam menghadapi tantangan etika di dunia maya. Menurut Mulyasa (2021), efektivitas pembelajaran ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam menunjukkan perubahan perilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Dalam konteks pembelajaran PPKn, hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran siswa terhadap pentingnya tanggung jawab, kejujuran, serta empati dalam berinteraksi di ruang digital.

Strategi yang diterapkan guru di SMA Negeri 8 Samarinda dinilai efektif karena memadukan berbagai pendekatan aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan diskusi reflektif, yang semuanya berorientasi pada pengalaman belajar nyata siswa. Melalui pembelajaran tersebut, siswa didorong untuk mengaitkan materi PPKn dengan fenomena digital yang mereka alami, seperti etika dalam berkomentar di media sosial atau dampak penyebaran berita palsu. Hal ini sejalan dengan pendapat Trianto (2020) yang menyatakan bahwa pembelajaran aktif membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sosial. Guru juga menekankan aspek reflektif dengan mengajak siswa menganalisis perilaku digital mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma kewarganegaraan.

Selain penerapan metode yang variatif, efektivitas strategi juga sangat bergantung pada konsistensi guru dalam memberikan keteladanan. Guru yang mampu menampilkan perilaku digital yang sopan, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pendapat memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan karakter siswa. Menurut Zubaedi (2021), keteladanan guru memiliki daya internalisasi yang tinggi karena nilai-nilai moral lebih mudah diserap melalui pengalaman dan pengamatan

langsung. Oleh karena itu, strategi guru dalam pembelajaran PPKn tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga berhasil membentuk kesadaran moral serta perilaku etis siswa dalam bermedia digital.

B. Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Etika Kewarganegaraan Digital

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempermudah guru dalam menerapkan internalisasi etika kewarganegaraan digital.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), keberhasilan guru dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital kepada siswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung proses pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang efektif dan kondusif, sehingga nilai-nilai etika digital dapat disampaikan dengan cara yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh siswa. Di era digital saat ini, guru membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik dari segi fasilitas, lingkungan sekolah, maupun karakter siswa itu sendiri, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan guru dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital kepada siswa tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), faktor-faktor seperti kompetensi pedagogik dan teknologi guru, fasilitas sekolah yang memadai, serta karakter siswa yang adaptif terhadap teknologi menjadi penentu utama keberhasilan penerapan nilai-nilai etika digital di lingkungan sekolah (Wibowo, 2020).

Guru yang memiliki kesiapan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran cenderung lebih mudah mengintegrasikan nilai-nilai etika digital ke dalam kegiatan belajar. Penggunaan media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan simulasi daring memungkinkan siswa untuk memahami konsep etika kewarganegaraan secara kontekstual dan menarik (Sani, 2019). Selain itu, kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik siswa yang akrab dengan dunia digital menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai etika.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan sarana dan prasarana sekolah, seperti ketersediaan jaringan internet, proyektor, laboratorium komputer, serta perangkat multimedia. Sarana tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan dunia digital siswa (Hidayat, 2021). Lingkungan sekolah yang memiliki budaya disiplin, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral juga memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Budaya sekolah yang positif akan membentuk iklim akademik yang mendukung penerapan etika digital secara konsisten (Sudrajat, 2020).

Selain dukungan fasilitas dan kompetensi guru, antusiasme dan keterbukaan siswa terhadap teknologi turut mempermudah proses pembelajaran. Siswa yang aktif dan terbiasa menggunakan teknologi akan lebih mudah memahami dan mengaitkan nilai-nilai etika digital dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan bermakna.

Dari berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan guru PPKn dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital di SMA Negeri 8 Samarinda dipengaruhi oleh sinergi antara kesiapan guru, dukungan fasilitas sekolah, dan partisipasi aktif siswa. Ketiga faktor tersebut menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi proses pembentukan karakter digital yang beretika dan bertanggung jawab. Sejalan dengan pendapat Sari (2022), keberhasilan pendidikan karakter di era digital hanya dapat dicapai

apabila terdapat keseimbangan antara kompetensi guru, sarana pendukung, dan partisipasi aktif peserta didik.

2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi guru selama proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru tidak hanya menghadapi peluang, tetapi juga sejumlah kendala dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital kepada siswa. Hambatan-hambatan ini muncul dari berbagai aspek, baik dari faktor internal guru maupun kondisi eksternal yang terkait dengan lingkungan belajar. Secara umum, kendala yang sering muncul berkaitan dengan keterbatasan waktu, sarana, dan variasi kemampuan siswa dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai etika digital dalam kehidupan sehari-hari.

Guru PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda menyadari bahwa meskipun siswa sudah terbiasa menggunakan teknologi, tidak semua dari mereka memiliki kesadaran untuk berperilaku etis di ruang digital. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kontrol terhadap aktivitas siswa di luar sekolah, terutama di media sosial, sehingga sulit memastikan konsistensi penerapan nilai-nilai yang telah diajarkan. Selain itu, perbedaan latar belakang dan tingkat pemahaman siswa juga menjadi kendala tersendiri dalam proses pembelajaran.

Selain faktor pendukung, penerapan internalisasi etika kewarganegaraan digital dalam pembelajaran PPKn juga menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari faktor internal maupun eksternal, baik yang berasal dari keterbatasan guru, kondisi siswa, maupun lingkungan sosial di luar sekolah.

Secara umum, hambatan yang sering dihadapi guru berkaitan dengan perbedaan kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan etika digital, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas digital di luar sekolah, serta keterbatasan sarana dan jaringan internet bagi sebagian siswa. Meskipun siswa kini lebih terbiasa menggunakan teknologi, tidak semua memiliki kesadaran untuk berperilaku etis di ruang digital. Banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami batasan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral di media sosial (Nugraha, 2021).

Hambatan eksternal juga muncul dari pengaruh lingkungan sosial dan budaya digital yang bebas, di mana siswa seringkali meniru perilaku negatif dari konten daring tanpa mempertimbangkan dampak moralnya. Lingkungan pertemuan yang permisif terhadap perilaku tidak etis di dunia maya memperburuk tantangan guru dalam menanamkan nilai-nilai etika digital (Rohman, 2020). Selain itu, kurangnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak di rumah turut menjadi kendala signifikan. Menurut Lestari (2022), keterlibatan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai etika antara lingkungan sekolah dan rumah.

Dari sisi infrastruktur, keterbatasan akses teknologi bagi sebagian siswa—seperti tidak memiliki perangkat pribadi atau jaringan internet yang stabil—juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital (Herlina, 2020). Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penerapan internalisasi etika kewarganegaraan digital di SMA Negeri 8 Samarinda mencakup tiga aspek, yaitu (1) pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung perilaku etis digital, (2) kurangnya kontrol orang tua terhadap aktivitas daring siswa, dan (3) keterbatasan akses terhadap sarana teknologi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya sinergi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk ekosistem pendidikan yang konsisten menanamkan nilai-nilai moral digital.

Dengan demikian, keberhasilan internalisasi etika kewarganegaraan digital tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PPKn, tetapi juga memerlukan dukungan kolaboratif dari seluruh unsur pendidikan, agar siswa dapat tumbuh sebagai warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkepribadian Pancasila.

C. Upaya yang Dilakukan Guru dalam Proses Internalisasi Etika Kewarganegaraan Digital pada Siswa

1. Memahami bagaimana nilai-nilai etika kewarganegaraan digital disampaikan dan dipahami siswa selama pembelajaran.

Dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda, nilai-nilai etika kewarganegaraan digital disampaikan secara kontekstual dan integratif melalui kegiatan belajar yang dekat dengan kehidupan digital siswa. Guru PPKn berupaya mengaitkan materi kewarganegaraan dengan situasi nyata di dunia maya, seperti penggunaan media sosial, penyebaran informasi, serta interaksi digital antarindividu. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, dan empati menjadi dasar dalam setiap aktivitas pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami bahwa etika dalam dunia digital merupakan bagian penting dari sikap kewarganegaraan yang beradab.

Penyampaian nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran aktif seperti diskusi reflektif, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, guru menghadirkan kasus pelanggaran etika digital seperti ujaran kebencian atau penyebaran hoaks, lalu meminta siswa menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum. Dengan cara ini, siswa tidak hanya diajak memahami konsep etika secara teoritis, tetapi juga berlatih menilai dan mengambil keputusan moral terhadap perilaku digital yang mereka jumpai sehari-hari.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 8 Samarinda, penyampaian nilai-nilai etika kewarganegaraan digital dilakukan secara kontekstual dan integratif. Guru mengaitkan materi kewarganegaraan dengan fenomena digital yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti perilaku di media sosial, penyebaran informasi, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, dan empati menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga siswa memahami bahwa etika dalam dunia digital merupakan bagian penting dari tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang beradab (Majid, 2020).

Guru PPKn berperan aktif dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut melalui berbagai strategi pembelajaran aktif, seperti *diskusi reflektif*, *studi kasus*, dan *project-based learning*. Misalnya, guru menghadirkan contoh kasus pelanggaran etika digital seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian, kemudian meminta siswa untuk menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mempelajari etika digital secara teoritis, tetapi juga berlatih mengambil keputusan moral terhadap situasi nyata di dunia maya (Sanjaya, 2019).

Selain itu, proses penyampaian nilai dilakukan dengan pendekatan keteladanan guru (*role modeling*). Guru berusaha menjadi contoh nyata dalam berperilaku etis di ruang digital, seperti menyampaikan informasi dengan sopan, menghormati privasi orang lain, serta menggunakan sumber digital yang valid dan bertanggung jawab. Keteladanan tersebut menciptakan pembelajaran moral yang lebih bermakna karena siswa belajar melalui pengamatan terhadap perilaku guru, bukan hanya melalui penjelasan verbal. Menurut Zubaedi (2021), pembentukan karakter peserta didik akan lebih efektif jika guru konsisten menampilkan nilai-nilai moral yang ingin ditanamkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyampaian dan pemahaman nilai-nilai etika kewarganegaraan digital dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda

berlangsung secara interaktif, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan karakter digital siswa. Proses ini membantu siswa tidak hanya memahami konsep etika digital, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang nyata maupun dunia maya.

2. Menggambarkan cara siswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam sikap, perilaku, dan interaksi di lingkungan sekolah.

Dalam era digital saat ini, perilaku siswa di dunia maya menjadi cerminan dari karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan yang mereka miliki. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep etika kewarganegaraan digital secara teoritis, tetapi juga pada bagaimana siswa mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan nyata. Proses internalisasi ini terlihat dari kemampuan siswa menerapkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, dan empati dalam setiap bentuk interaksi, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital.

Guru PPKn memiliki peran penting dalam membimbing siswa agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kepribadian mereka. Melalui pendekatan pembelajaran kontekstual dan kegiatan reflektif, guru membantu siswa memahami makna etika digital serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pembelajaran yang demikian memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara perilaku di dunia maya dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Internalisasi nilai-nilai etika kewarganegaraan digital oleh siswa SMA Negeri 8 Samarinda tampak dalam sikap, perilaku, dan interaksi sosial mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di dunia digital. Siswa tidak hanya memahami konsep etika digital secara kognitif, tetapi juga menunjukkan penerapannya secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan saling menghormati menjadi pedoman siswa dalam berinteraksi, baik saat bekerja sama dalam kelompok belajar, berkomunikasi di media sosial, maupun dalam menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab (Mulyasa, 2021).

Guru PPKn berperan dalam membimbing siswa agar nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kepribadian mereka. Melalui kegiatan reflektif dan pembiasaan, siswa diajak untuk menilai perilaku mereka sendiri dan memahami konsekuensi moral dari setiap tindakan digital yang dilakukan. Proses ini membantu mereka mengembangkan kesadaran etis dan kemampuan berpikir kritis, yang menjadi dasar pembentukan karakter kewarganegaraan digital (Trianto, 2020).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu menunjukkan perilaku digital yang mencerminkan nilai-nilai etika kewarganegaraan. Mereka lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, menghindari komentar yang menyinggung, menghormati privasi teman, dan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti belajar atau berbagi informasi bermanfaat. Selain itu, dalam konteks pembelajaran daring, siswa juga berusaha bersikap jujur, tidak melakukan plagiarisme, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.

Dengan demikian, proses internalisasi nilai-nilai etika kewarganegaraan digital di SMA Negeri 8 Samarinda telah menunjukkan hasil yang positif. Siswa tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut secara konseptual, tetapi juga telah menanamkannya dalam tindakan nyata. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembelajaran PPKn sebagai wahana pembentukan karakter digital yang beretika, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru PPKn di SMA Negeri 8 Samarinda telah menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan berbasis nilai dalam menginternalisasikan etika kewarganegaraan digital kepada siswa. Melalui metode seperti Project-Based Learning (PjBL), studi kasus, dan diskusi reflektif, guru berhasil mengaitkan materi kewarganegaraan dengan fenomena digital yang relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa terhadap etika digital, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral untuk berperilaku bijak, sopan, dan bertanggung jawab di ruang digital. Keteladanan guru dalam menggunakan media digital secara etis turut memperkuat proses pembentukan karakter siswa sebagai warga digital yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, proses internalisasi nilai-nilai etika kewarganegaraan digital pada siswa menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari perubahan sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi di lingkungan sekolah maupun di dunia maya. Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, menghormati privasi orang lain, dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang produktif. Keberhasilan ini didukung oleh kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, fasilitas sekolah yang memadai, serta antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan berbasis digital. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti pengaruh lingkungan digital yang bebas, kurangnya kontrol orang tua, dan keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan internalisasi etika kewarganegaraan digital membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar siswa dapat tumbuh menjadi warga digital yang cerdas, berkarakter, dan berkepribadian Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. (2024). Etika digital dalam pendidikan abad ke-21: Tantangan dan implementasi di sekolah menengah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arsyad, A. (2020). Media pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiarto, A., & Rahmawati, N. (2022). Digital citizenship dalam pembelajaran abad ke-21. Jakarta: Kencana.
- Dick, W., & Carey, L. (2015). The systematic design of instruction. Pearson Education.
- Hamalik, O. (2019). Proses belajar mengajar. Bandung: Bumi Aksara.
- Herlina, M. (2020). Hambatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran digital di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Modern*, 8(1), 75–88. <https://doi.org/xxxx>
- Hidayat, T. (2020). Etika digital dan pendidikan karakter di era Revolusi Industri 4.0. Bandung: Alfabeta.
- Joyce, B., & Weil, M. (2011). Models of teaching. Pearson Education.
- Kemendikbudristek. (2022). Profil pelajar Pancasila dan penguatan pendidikan karakter di era digital. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Literasi digital nasional. Jakarta: Kominfo RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Survei nasional literasi digital Indonesia. Jakarta: Kominfo RI.
- Majid, A. (2020). Strategi pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, S. (2021). Tantangan perilaku etika digital siswa di era media sosial. *Jurnal Pendidikan Moral*, 9(2), 130–142. <https://doi.org/xxxx>
- Ohler, J. (2016). Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know. Eugene, OR: ISTE Press.
- Putri, L. A. (2022). Kesadaran etika digital siswa SMA dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Civics*:

- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 20(4), 475–486. <https://doi.org/xxxx>
- Ribble, M. (2015). Digital citizenship in schools. Washington, DC: ISTE.
- Rusman. (2021). Model-model pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme guru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sani, R. A. (2019). Strategi pembelajaran inovatif kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, W. (2018). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Sari, R. (2022). Kolaborasi guru dan siswa dalam pendidikan karakter digital. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 220–233. <https://doi.org/xxxx>
- Sudrajat, A. (2020). Budaya sekolah dalam pembentukan karakter digital siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(3), 245–257. <https://doi.org/xxxx>
- Suyono, & Hariyanto. (2017). Belajar dan pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Trianto. (2020). Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif. Jakarta: Kencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibowo, A. (2020). Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dan tantangan era digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. (2021). Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan. Jakarta: Kencana.